

BAB 3

TRANSFORMASI GERAKAN ACEH MERDEKA MENJADI PARTAI ACEH

3.1. Proses Transformasi GAM Menjadi Partai Aceh

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia, akhirnya mencapai satu konsensus untuk mengakhiri konflik bersenjata di Aceh yang sudah berlangsung hampir tiga puluh tahun. Pada 15 Agustus 2005, kedua pihak sepakat untuk menandatangani nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding-MoU*) di Helsinki, Finlandia. Sebuah lembaga internasional yang bergerak di bidang penyelesaian konflik, *Crisis Management Initiative* (CMI) yang berkedudukan di Finlandia dan dipimpin oleh mantan Presiden Finlandia, Marti Ahtisaari, telah berhasil memfasilitasi perundingan tersebut.

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut menjadi langkah awal bagi kedua belah pihak untuk memasuki proses baru untuk mengakhiri konflik bersenjata di Aceh. Klausul-klausul dalam MoU tersebut antara lain memberi peluang kepada GAM untuk berpartisipasi dalam proses politik di Aceh, termasuk mendirikan partai politik lokal. Proses ini akan menjadi babak baru bagi GAM untuk melakukan transformasi dari gerakan bersenjata ke gerakan politik.

Sebagai gerakan yang mengandalkan perjuangan bersenjata, GAM selama hampir tiga puluh tahun telah berhasil menanamkan pengaruhnya dalam masyarakat Aceh, terutama di kampung-kampung. Hal ini dibuktikan oleh kemampuan GAM mempertahankan struktur dan ideologi perjuangan mereka untuk memisahkan Aceh dari Indonesia. GAM juga berhasil mendapatkan dukungan kaum muda dan kelompok intelektual yang merasakan ketidakadilan dalam sistem politik Indonesia

Kemauan GAM untuk menandatangani kesepakatan damai yang memberi konsekuensi terhadap pembubarannya sayap militer dan perlucutan senjata, mengejutkan banyak pihak. Sebelumnya, terutama di awal pemberlakuan darurat militer Mei 2003, GAM masih menggunakan retorika kemerdekaan dan akan bertempur hingga “titik darah penghabisan”. Mereka juga menolak apapun

konsesi politik yang ditawarkan pemerintah Indonesia, di luar opsi kemerdekaan. Namun, sejarah bergerak secara dinamis berdasarkan konstelasi geopolitik kawasan dan dunia termasuk faktor bencana tsunami, akhirnya GAM pun memberi persetujuan terhadap tawaran konsesi politik yang diajukan pemerintah.

Sebagai bagian dari penerimaan konsesi politik tersebut, GAM akan mengubah dirinya menjadi partai politik lokal dalam waktu selambat-lambatnya 18 bulan setelah MoU ditandatangani. Namun, dalam kurun waktu tersebut, pemerintah telah merencanakan untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Aceh pada Agustus atau September tahun 2006. GAM diperkirakan akan ikut dalam proses pilkada tersebut, tetapi menggunakan jalur independen.

Transformasi GAM sebagai sebuah gerakan bersenjata ke gerakan politik ditandai oleh tiga hal. *Pertama*, mereka telah melakukan proses *decommissioning* sebanyak lebih dari 840 pucuk senjata. *Kedua*, mereka membubarkan sayap militer dan membentuk sebuah organisasi sipil untuk menampung mantan petempur yang diberi nama Komite Peralihan Aceh (KPA). *Ketiga*, GAM secara terbuka mengatakan akan berpartisipasi dalam proses politik (pilkada) di Aceh pada tahun 2006 ini.

Komitmen mengalihkan perjuangan bersenjata ke dunia politik dipenuhi pihak GAM dengan membentuk partai politik lokal di Aceh. Pemimpin GAM, Malik Mahmud mengatakan GAM menunggu RI mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) tentang pembentukan partai politik lokal itu, dan setelah PP tersebut disahkan kita siap mengorganisasikan GAM untuk menjadi partai politik lokal.³⁶

Kesiapan GAM maju ke dunia politik, menurut Malik Mahmud sudah diputuskan pada akhir 2005 di Swedia dan pada saat kepulangan Malik Mahmud ke Aceh pada April 2006. Untuk itu, GAM telah membentuk tim yang akan mengorganisir pembentukan partai politik lokal. Tim itu terdiri dari berbagai kalangan termasuk mantan aktivis mahasiswa dan sejumlah kalangan akademisi. Menurut sumber internal GAM, keputusan itu di kenal sebagai *Stockholm*

³⁶ Lihat Gerakan Aceh Merdeka (GAM) akan berbentuk Parpol Lokal, *Serambi Indonesia*, 3 Desember 2006.

Scenario, suatu rencana yang harus di lalui GAM dalam rangka mentransformasikan diri ke partai politik.³⁷

3.2. Hambatan GAM Dalam Bertransformasi

Sejumlah persoalan muncul pada masa pembentukan partai politik lokal oleh GAM. Pertama terkait eksistensi GAM, apakah gerakan itu masih tetap ada setelah partai politik lokal terbentuk atau tidak. Kedua, menyangkut penamaan partai GAM dan pemakaian simbol yang menyulut kontroversi baik di tubuh GAM sendiri, maupun pemerintah Indonesia.

Persoalan pertama hadir pada saat rapat komisi pengaturan keamanan atau di kenal sebagai CoSA Meeting terakhir pada tanggal 2 Desember 2006, menjelang berakhirnya misi *Aceh Monitoring Mission* (AMM). Hadir pada rapat terakhir itu ketua AMM, Peter Feith, dan para pimpinan GAM seperti Malik Mahmud, Zaini Abdulah, Muhammad Usman Lampoh Awe, serta Menteri Negara Komunikasi dan Informasi, Sofyan Djalil. Hadir pula *senior representative* GAM untuk AMM, Zakaria Saman dan *Senior representative* RI di AMM, Mayjen TNI Bambang Darmono, Kapolda NAD Irjen. Pol BahrumSyah Kasman, Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Supiadin AS, Pejabat Sementara Gubernur NAD Mustafa Abubakar.

Setelah pertemuan itu Peter Feith mengatakan “ ada semacam pengertian pihak GAM akan mulai bertransisi ke arah pergerakan politik”. Menurutnya, awal transisi itu akan dimulai pada akhir 2006 setelah peraturan pemerintah (PP) tentang partai lokal keluar. Setelah keluarnya PP itu dan setelah GAM membentuk partai politik lokal lanjut Peter Feith, “ berdasarkan pemahaman pribadi saya, segera setelah itu secara praktisnya pergerakan GAM sudah di bubarkan”.³⁸

Eksistensi GAM setelah perdamaian mendapat sorotan tajam. AMM dan pemerintah Indonesia kerap mendesak GAM segera membubarkan diri. Ketua DPR RI Agung Lasksono dan ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid termasuk dua figur yang kerap meminta GAM segera dibubarkan, terutama setelah pemerintah

³⁷ Makalah untuk seminar Nasional “ *Demokratisasi: Pengalaman dari Aceh*”, diselenggarakan oleh perkumpulan Demos, di hotel Nikko, Jakarta, 16 Juni 2009.

³⁸ Lihat, *Gerakan Aceh Merdeka (GAM) akan berbentuk parpol Lokal*, Serambi Indonesia, 3 Desember 2006.

mengesahkan UU No. 11. 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla setelah butir-butir MoU Helsinki dijalankan maka GAM tidak diperlukan lagi alias dibubarkan. Pembubaran GAM dimaksudkan supaya muncul rasa aman dan kepercayaan internasional terhadap Perdamaian di Aceh.

Pada kesempatan lain, Jusuf Kalla bahkan pernah menolak bertemu Hasan Tiro, Pimpinan GAM pada 11 Oktober 2008 di Banda Aceh karena diundang dengan menggunakan surat berkop GAM. Surat berkop itu dianggap sebagai pesan bahwa GAM tidak bubar. Menteri BUMN yang juga kelahiran Aceh, Sofyan Djalil menganggap setelah dikeluarkan PP partai politik Lokal GAM telah memiliki komitmen mentransformasikan diri menjadi salah satu parpol lokal di Aceh. Selanjutnya partai ini akan berpartisipasi dalam proses politik sesuai konstitusi RI. Selanjutnya apakah transformasi ke partai lokal seperti di sebut Sofyan Djalil bermakna pembubaran GAM maka tidak ada jawaban pasti tentang hal ini.

Menurut sejumlah pengamat tidak ada klausul dalam MoU Helsinki memuat pembubaran GAM. Kesepakatan damai hanya menegaskan pembubaran Tentara Negara Aceh (TNA), sayap Militer GAM yang kemudian menjadi Komite Peralihan Aceh (KPA) sebagai wadah para mantan kombatan GAM.³⁹

Sementara pihak GAM sendiri tak pernah mengatakan secara resmi GAM akan dibubarkan setelah misi AMM berakhir atau disahkannya UU tentang pemerintahan Aceh. Keterangan para petinggi GAM juga tidak eksplisit menyebut ihwal pembubaran GAM. Bahkan mereka sempat menggunakan nama GAM sebagai nama partai politik yang mereka bentuk. Usulan nama itu kemudian ditolak Pemerintah Indonesia.

Pemakaian nama GAM sebagai partai politik lokal juga menuai polemik di Aceh dan Jakarta. Partai GAM dideklarasikan pada 7 Juli membawa nama GAM tanpa kepanjangan dan gambar bulan sabit sebagai lambang partai. Penggunaan nama dan lambang itu memunculkan konflik politik internal. Sejumlah bekas panglima GAM tak setuju nama dan lambang itu dipakai karena dianggap merendahkan GAM yang pernah berperang melawan Pemerintah Indonesia. Sofyan Dawood satu diantara tokoh yang menolak, mengatakan nama dan simbol

³⁹ Lihat, Pesan dalam surat berkop GAM, GAM Tak Bubar, *Harian Aceh*, 11 Oktober 2008.

GAM tidak boleh digunakan partai politik. Nama dan simbol itu adalah milik rakyat Aceh.

Hambatan pembentukan partai GAM juga muncul dari Pemerintah. Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalata mengatakan pendirian partai GAM bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi RI. Juga selain itu partai GAM dinilai bertentangan dengan UU No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. Pemerintah RI menilai pembentukan partai GAM membahayakan NKRI dan bertentangan dengan MoU Helsinki. Pemerintah menyebut satu butir perjanjian yang melarang anggota GAM memakai seragam maupun menunjukkan emblem atau simbol militer setelah penandatanganan nota kesepahaman. Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan tidak pernah menyetujui pembentukan Partai GAM. Alasan pemerintah, Partai GAM tidak sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu MoU Helsinki dan semangat NKRI, menghilangkan luka lama, dan semangat rekonsolidasi.⁴⁰

Para petinggi GAM awalnya tetap mempertahankan nama dan simbol GAM itu, meskipun dibayangi perpecahan internal. Mereka menganggap Partai GAM tidak berbeda haluan dengan MoU Helsinki dan masih dalam kerangka NKRI. Kata mereka, partai GAM tidak perlu dicurigai atau ditakuti hanya karena simbol tertentu. Partai GAM tetap berkomitmen berada dalam NKRI sesuai MoU Helsinki.⁴¹

Namun menjelang proses verifikasi dilakukan kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM Aceh partai GAM mengubah namanya menjadi partai Gerakan Aceh Mandiri dengan tetap memakai singkatan GAM. Langkah ini untuk menyesuaikan diri dengan sistem Hukum Indonesia yang melarang simbol atau nama berbau separatis. Perombakan dilakukan sana-sini termasuk tak lagi memakai lambang bulan sabit. Posisi ketua partai GAM yang awalnya dijabat Malik Mahmud lalu diganti oleh Muzakir Manaf. Malik Mahmud tak bisa menjadi ketua partai karena berstatus warga negara asing.

Malik Mahmud menyetujui perubahan dan perombakan ini. Keputusan itu membuka jalan bagi konsolidasi organisasi dan menghilangkan perpecahan yang

⁴⁰ Lihat, Presiden tak Pernah setuju Pembentukan Partai GAM, *Antara News*, 9 Juli 2007

⁴¹ Wawancara dengan Ibrahim KBS pada tanggal 19 Juli 2007 di Lhoksemae. Lihat Ideologi Partai GAM tidak jelas. *Waspada*, 18 juli 2007.

sempat muncul sebelumnya. Adnan Beuransyah, Juru bicara Partai GAM, mengatakan pergantian nama itu dilakukan untuk menjaga keberlanjutan perdamaian Aceh. Dia mengharapkan dengan pergantian nama itu tidak ada lagi suara miring yang menuduh GAM tak mendukung perdamaian di Aceh.⁴²

Pergantian nama dan lambang GAM menjadi partai gerakan Aceh mandiri tidak langsung menyelesaikan kontroversi ini. Jakarta masih melihat pergantian nama ini tetap punya kaitan dengan GAM. Perdebatan sempat memanaskan pada pertemuan informal delegasi GAM dan RI di Makasar pada tanggal 9-10 Februari 2008, di mana *MoU Round Table* (MRT) dilaksanakan. MRT adalah pertemuan informal antara delegasi GAM dan RI, setelah MoU Helsinki yang difasilitasi IPI (*Interpeace Aceh Program*), sebuah lembaga pemantau perdamaian Aceh. Polemik ini berakhir setelah GAM bersedia mengganti nama partainya menjadi Partai Aceh (PA) pada Mei 2008. Langkah ini adalah kompromi GAM untuk bisa lolos verifikasi Depkumham dan bisa ikut Pemilu 2009.⁴³

3.3. Pengesahan KPU

Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), ada 44 partai politik yang berhak mengikuti pemilu 2009, enam di antaranya partai lokal Aceh. Ini adalah kesempatan pertama bagi partai lokal ini untuk membentur bandul waktu, menggeser partai politik nasional dalam merebut hati dan pikiran rakyat di pemilu, terutama bagi daerah konflik seperti Aceh, Maluku, dan Papua. Jika pada pemilu 2009, partai lokal Aceh bisa merebut 30 persen saja dari total kursi legislatif di Aceh, tentu akan terjadi revisi politik serius keberadaan partai politik nasional. Keberhasilan itu pasti diikuti Papua yang memiliki peluang melalui UU otonomi khusus.

Dalam sejarah pemilu di Indonesia, Aceh adalah provinsi terakhir yang dapat mempertahankan diri dari hegemoni Golkar. Pada pemilu 1987, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang disimbolkan dengan Ka'bah, meskipun kalah tipis oleh partai berlambang beringin itu tetap menunjukkan kemampuannya bersaing dengan Golkar. Pada 1992 Golkar mampu mengulangi kemenangannya

⁴² *Tabloid Sipil*, Edisi 4 Tahun I Mei 2008. Langkah Kompromi Pihak GAM.

⁴³ *Ibid.*

dalam sebuah pemilu yang sangat jauh dari *fair* dan demokratis, karena Aceh baru dikejutkan oleh sebuah operasi militer. Kehadiran partai politik lokal di Aceh tidak lepas dari peluang yang terdapat di Perjanjian Helsinki, bahwa kehadiran partai politik lokal menjadi skenario mengakhiri transisi konflik menuju perdamaian berkelanjutan.

Dari enam partai lokal yang lulus verifikasi Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Partai Aceh adalah yang paling menonjol. Partai ini memiliki cabang di seluruh kabupaten/kota, pengaruh kuat di pesisir timur, dan anggota yang cukup loyal. Tentu saja karena sebagian besar pengurus berasal dari mantan kombatan yang memiliki kepatuhan garis komando dan artikulasi perjuangan yang telah sama. Ketua Partai Aceh adalah Muzakkir Manaf, mantan panglima GAM. Pengaruh Partai Aceh yang besar tentu mengancam keberadaan partai-partai lain. Prasangka yang dimunculkan oleh lawan politiknya adalah kemenangan Partai Aceh pada pemilu 2009 akan menjadi jalan pintas menuju kemerdekaan.

Pemikiran ini tentu saja sebuah kecemasan yang berlebihan. *Pertama*, memperjuangkan kemerdekaan Aceh sama saja memulai konflik baru, hal yang bertentangan dengan semangat perdamaian dan demokrasi yang sedang gencar dipromosikan. Melanjutkan konflik itu juga berarti akan menghambat program rekonstruksi pasca tsunami. *Kedua*, daya tahan mantan kombatan untuk melanjutkan perang bergerilya sudah berada di titik nadir karena senjata-senjata mereka telah dimusnahkan. Beberapa aksi bersenjata akhir-akhir ini tidak berasal dari kelompok resmi, tapi milisi sempalan yang bertujuan pragmatis dan pribadi. *Ketiga*, kelompok pemberontak telah menunjukkan perubahan orientasi gerakan dengan mengubah nama organisasi. Saat ini mereka tidak lagi menamakan diri Gerakan Aceh Merdeka (GAM), nama yang berkonotasi militer, tetapi Komite Peralihan Aceh (KPA), yang memiliki tujuan partisipasi dan transformasi politik secara damai dan konstitusional. Salah satu proses transformasi adalah membentuk partai.

Berbeda dengan partai nasional yang tidak memiliki massa loyalis dan hanya bertumpu pada kekuatan oligarkhi dan uang, keberadaan Partai Aceh yang memiliki pendukung yang loyal jelas menjadi ancaman. Keberhasilan Partai Aceh

selama ini tidak lain karena kemampuan merepresentasikan diri sebagai satu-satunya partai yang sah dari kesepakatan Helsinki dan mendefinisikan diri sebagai komunitas tertindas dari Jakarta .

Sebenarnya dua partai lain patut dianggap kompetitor serius, yaitu Partai SIRA dan Partai Rakyat Aceh (PRA). Kedua partai dibentuk oleh mantan aktivis mahasiswa dan memiliki basis massa yang terkonsentrasi di perkotaan dan non-daerah konflik (pesisir barat dan pedalaman), berpopulasi 30 persen dari total penduduk Aceh. Retorika politik mereka lebih modern dan akademis. Apabila ketiga partai ini diakumulasi, maka potensinya akan meredam kekuatan 38 partai nasional, meraih kekuatan mayoritas sederhana (sekitar 50 persen) serta menguasai parlemen Aceh.

Kesadaran ini yang perlu ditumbuhkan, bahwa menguatnya pengaruh partai lokal di Aceh adalah bagian dari lahirnya demokrasi baru di Indonesia, demokrasi yang berbasis sejarah lokal. Kemenangan ini tidak dapat dikatakan sebagai etno-nasionalisme tapi lapuknya partai politik nasional yang gagal menangkap keringat dan air mata masyarakat daerah. Borjuisme partai politik nasional tidak berbanding lurus dengan simpati masyarakat. Pilkada 11 Desember 2006 di Aceh menjadi bukti gagalnya tesis tersebut, ketika tokoh independen memenangi kursi Gubernur dan 16 kursi Bupati/Walikota dari 19 daerah pemilihan.

3.4. GAM dan Partai Politik

Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No 20 Tahun 2007 tentang partai politik lokal di Aceh menjadi kabar baik bagi mereka yang ingin mengartikulasikan kepentingan politiknya secara konstitusional, damai dan demokratis di Aceh.⁴⁴ Kendati PP tersebut terbit terlambat karena para penggagas partai lokal telah melakukan berbagai persiapan jauh-jauh hari sebelumnya, keberadaan PP tersebut akan menjadi *legal standing* penting bagi pembentukan

⁴⁴ Tim Demos Aceh, *Himpunan Undang-undang partai politik lokal* (Banda Aceh: Demos Aceh, 2008), hlm. 451.

partai lokal. Lalu masalahnya, akankah partai lokal meraih kejayaan politik di Aceh? Dan bagaimana strategi partai nasional menyikapi situasi ini.

Secara teoritis, partai politik berperan sebagai sarana untuk mengoperasionalkan fungsi-fungsi politik, seperti sosialisasi politik, rekrutmen politik, artikulasi dan agregasi kepentingan politik masyarakat. Fungsi-fungsi ini terkait dengan kedudukan partai politik sebagai salah satu penghuni sistem politik. Sistem politik sendiri menurut pendekatan Fungsional Estonian terdiri dari dua sub sistem yaitu, infrastruktur politik dan suprastruktur politik.

Dalam pengertian sederhana, infrastruktur politik merupakan suasana kehidupan politik ditingkat masyarakat yang mencerminkan dinamika organisasi sosial politik diluar pemerintahan. Sementara suprastruktur politik merupakan suasana kehidupan politik didalam pemerintahan dan berkaitan dengan peran dan fungsi lembaga-lembaga pemerintahan.

Kehidupan politik baru di Aceh dimulai dengan kesuksesan perundingan damai Helsinki antara GAM-RI yang dilanjutkan dengan lahirnya UU Pemerintahan Aceh. Salah satu pesan implisit dari MoU Helsinki dan UUPA adalah kekuatan-kekuatan politik di Aceh yang selama ini berseberangan garis politik dan ideologinya dengan pemerintah akan melakukan transformasi menjadi gerakan politik dengan membentuk partai-partai politik.

Suasana baru ini disambut dengan antusias oleh banyak kalangan karena mereka melihat bahwa diantara agenda penting di Aceh adalah merawat perdamaian dan menyuburkan demokrasi. Perdamaian tidak bisa langgeng ketika kelompok kritis dan strategis tidak bisa mendapatkan ruang untuk mengartikulasikan kepentingan politiknya.

Dari dimensi politik, partai politik lokal merupakan saluran demokratik dari perlawanan politik yang selama ini muncul di Aceh. Ada hak-hak politik, ekonomi dan sosial rakyat Aceh yang terabaikan sehingga menimbulkan reaksi keras khas Aceh, perang. Pembentukan partai politik lokal ini menegaskan bahwa rakyat Aceh bukan hanya bisa memperjuangkan hak-haknya melalui perjuangan bersenjata, tetapi siap juga hidup dalam aturan-aturan demokrasi. Kehadiran partai lokal penting karena ia mendekatkan dua jarak yang selama ini tidak dapat

dipertemukan, yaitu jarak kepentingan antara konstituen dengan partai, dan jarak ideologis antara kelompok perlawanan di Aceh dengan pemerintah.

Dimensi lokalitas partai lokal berfungsi untuk mendekatkan jarak kepentingan pertama. Selama ini partai politik nasional seperti hidup dalam sistem kedekatan imajiner dengan para konstituen di akar rumput. Elit partai baik di level nasional maupun level lokal hanya menjadi juru bicara bagi dirinya sendiri dan tidak membawa kepentingan rakyat secara aspiratif. Publik lebih mengenal partai politik nasional dan tokoh-tokohnya karena konflik internal atau skandal, bukan karena program partai yang mencerdaskan, mensejahterakan dan mencerahkan.

Jarak ini terlembaga selama puluhan tahun dalam sistem politik nasional yang mengabaikan keterwakilan aspirasi lokal. Bagi elit partai nasional, pengurus pusat atau DPP bagaikan raja yang titah-titahnya harus dipatuhi. Keputusan DPP tidak bisa dilawan oleh pengurus-pengurus lokal karena bisa berpeluang terjadinya pembekuan kepengurusan di daerah. Intervensi-intervensi DPP bahkan kadang-kadang mengorbankan para politisi lokal yang memiliki akar kekuasaan di daerahnya. Sementara dalam konteks jarak ideologis, partai lokal yang bertanding dalam sistem politik Indonesia harus tunduk di bawah aturan main seperti undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada, apapun ideologi politiknya. Secara tidak langsung terjadi reintegrasi sistemik, di mana partai lokal akan terikat dengan realitas bahwa mereka tidak bisa melepaskan diri dari kerangka sistem politik yang sedang berlaku. Di negara-negara yang penuh dengan konflik politik separatisme yang mengusung ideologi nasionalisme, partai politik lokal merupakan jalan keluar dalam rangka memperkuat otonomi politik daerah dan mengikat daerah tersebut dalam sistem politik nasional.

Jarak ideologis antara Indonesia dan GAM serta kelompok perlawanan seperti SIRA dikompromikan melalui pengakuan otoritas politik dua pihak terakhir oleh pemerintah Indonesia. Namun, otoritas politik tersebut hanya bisa diabsahkan melalui proses pemilihan dan pelembagaan politik kelompok-kelompok tersebut dalam sistem politik yang ada. Memang terdapat kemungkinan buruk bahwa kelompok-kelompok perlawanan yang telah terlembaga secara politik bisa menukar alat perjuangan politik mereka dengan terus menerus memperkuat otonomi politik hingga munculnya komunitas politik baru yang

merdeka, tetapi kemungkinan tersebut bisa diantisipasi dengan memperkuat komitmen pemerintah Indonesia untuk membangun Aceh secara bermartabat dan berkeadilan.

3.5. Pengaruh Terhadap Partai Nasional.

Lantas bagaimana kabar partai nasional di tahun 2009 di Aceh? Riset membuktikan bahwa yang agak mengejutkan adalah kecenderungan untuk membangun dan bergabung dengan partai lokal ternyata jauh lebih kuat (70%) di daerah-daerah yang mana partai politik lokal memenangkan pilkada 2006. Ini semakin membuktikan bahwa partai politik nasional sesungguhnya tidak populer di Aceh, juga di wilayah yang mana partai politik nasional menang. Kemenangan partai politik nasional mungkin terkait dengan beragam alasan namun yang jelas bukan karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik nasional tinggi. Bahkan sebaliknya di daerah-daerah tersebut, pilihan untuk bergabung dengan partai nasional tampak amat kecil enam persen. Alasan paling logis yang bisa dikemukakan adalah karena masyarakat setempat tidak menilai para kandidat GAM sebagai pilihan alternatif yang tepat untuk melakukan perubahan politik pada sebuah situasi transisi politik saat ini. Oleh karena itu dalam pilkada lalu mereka memilih untuk menunda melakukan perubahan pilihan politik kepartaian mereka hingga pemilu berikutnya saat di mana partai-partai politik lokal baru akan makin tersedia cukup banyak.⁴⁵

Pada sisi lain, besarnya kecenderungan untuk membangun dan bergabung dengan sebuah partai lokal mengisyaratkan tumbuhnya optimisme politik di kalangan masyarakat untuk menggunakan mekanisme formal demokrasi (partai) sebagai cara untuk mempengaruhi proses politik. Mereka memang selama ini telah kehilangan kepercayaan terhadap partai politik, tetapi tidak terhadap kerangka demokrasi baru di Aceh. Ini tentu saja sebuah sinyal positif bagi masa depan demokratisasi di Aceh.

⁴⁵ Laporan Riset Demos, “*Penelitian Mengenai Masalah-Masalah dan Pilihan-Pilihan Tentang Demokratisasi di Aceh Pasca MoU Helsinki*”. April 2007.

Berikut ini adalah data mengenai partisipasi politik dari rakyat Aceh terhadap kecenderungan partai lokal dan nasional yang dilakukan oleh Lembaga Riset Demos pada tahun 2007. Ini menunjukkan tingkat partisipasi politik yang tinggi terhadap keberadaan partai politik lokal.

Tabel 3.1 : Pilihan keterlibatan dalam politik

Apabila seseorang di gerakan yang Anda geluti di wilayah ini tertarik untuk melibatkan diri di dalam proses politik, jalur apakah yang paling tepat untuk ditempuh?	UM UM	IRN A ME NA NG	IRN A KAL AH	GA M	PARTA I POLITI K
Bergabung dengan partai politik nasional	22%	25%	15%	21%	6%
Membangun dan Bergabung dengan partai politik lokal	45%	43%	46%	44%	70%
Membangun kekuatan non-partai atau blok politik	28%	27%	33%	30%	21%
(Lain-lain)	5%	4%	5%	4%	2%

Sumber : Laporan Riset Demos, April 2007

Kendati demikian, upaya membangun kekuatan non-partai atau blok politik tampak tetap menjadi alternatif yang cukup banyak dipilih oleh berbagai elemen di dalam masyarakat. Terdapat 28% informan yang menilai bahwa orang-orang dilingkungan mereka memilih jalur non partai atau blok politik untuk mempengaruhi proses politik. Ini berarti jalur non partai merupakan pilihan keterlibatan politik kedua terbanyak pada semua kategori wilayah.

Dalam pemilihan umum 2009 diperkirakan akan muncul segitiga kompetisi di Aceh, yaitu kompetisi antara partai nasional dengan partai lokal untuk memperebutkan kursi DPRA dan DPRK, kompetisi antara sesama partai lokal untuk perwakilan lokal, dan kompetisi antara sesama partai politik nasional untuk merebut tiket ke DPR RI di Jakarta. Berdasarkan hasil Pemilu 2009 di Provinsi NAD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Perolehan Partai Politik di NAD pada Pemilu 2009

NAMA PARTAI	TOTAL	PERSEN
PARTAI DEMOKRAT	751,475	40.87
PARTAI GOLONGAN KARYA	193,631	10.53
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	130,278	7.08
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	113,580	6.18
PARTAI AMANAT NASIONAL	107,953	5.87
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	46,937	2.55
PARTAI HATI NURANI RAKYAT	44,235	2.41
PARTAI BULAN BINTANG	44,105	2.40
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	42,258	2.30

Sumber: Komite Independen Pemilu Aceh, 2009.

Tabel diatas menunjukkan kompetisi lokal yang melibatkan aktor-aktor yang lebih beragam dan banyak, sementara kompetisi untuk pemilu nasional hanya diisi oleh partai lama dan partai baru dari kalangan partai nasional saja. Untuk memperbesar perolehan tiket keJakarta, partai nasional bisa membangun koalisi terbatas dengan partai lokal. Mereka bisa membangun koalisi dengan partai lokal besar dengan sama-sama mendapat keuntungan politik. Partai politik nasional bisa mendapatkan dukungan politik di daerah dengan penambahan kursi di DPR RI karena didukung partai lokal, sementara partai politik lokal akan mendapatkan keuntungan politik dengan kewajiban partai politik nasional untuk membela kepentingan politik partai lokal ditingkat nasional.

Koalisi ini memang tidak menjamin bahwa tidak akan ada pengingkaran dari salah satu pihak. Tetapi yang penting diingat adalah politik itu adalah *art of possible*. Tergantung keahlian masing-masing pihak untuk menggunakan kemungkinan dan kesempatan yang ada untuk memperbesar pengaruh politik terhadap pihak lain. Pola koalisi ini akan bisa mengalokasikan kekuasaan politik yang terbatas untuk sama-sama membela kepentingan Aceh baik di Aceh sendiri maupun di Jakarta. Kalau koalisi terbatas ini muncul di DPRD Aceh dengan ditambah partai-partai lokal lain, sangat bagus juga bagi stabilitas politik pemerintahan di Aceh. Dengan pengalokasian sumber-sumber kekuasaan tersebut maka dipastikan partai lokal dan partai nasional bisa hidup bersama dalam sistem politik yang unik di Aceh.